SKRIPSI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCE* OLEH DESA DI KAPANEWON PRAMBANAN DAERAH PERBUKITAN DALAM MENGATASI MASALAH KRISIS AIR DI MASYARAKAT

(Penelitian di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta)

Disusun Oleh :

FELINDA KUSUMAWATI

18520011

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCE* OLEH DESA DI KAPANEWON PRAMBANAN DAERAH PERBUKITAN DALAM MENGATASI MASALAH KRISIS AIR DI MASYARAKAT

(Penelitian di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Disusun Oleh :

FELINDA KUSUMAWATI

18520011

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	14 April 2022
Jam	:	10.30 WIB
Tempat	:	Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. **Fatih Gama Abisono, S.IP., MA** Ketua Penguji/ Pembimbing	.....
2. **Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si** Penguji Samping I	.....
3. **Utami Sulistiana, S.P., M.P** Penguji Samping II	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	:	Felinda Kusumawati
Nomor Mahasiswa	:	18520011
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **"KELEMBAGAAN PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCE* OLEH DESA DI KAPANEWON PRAMBANAN DAERAH PERBUKITAN DALAM MENGATASI MASALAH KRISIS AIR DI MASYARAKAT"** ini sungguh merupakan hasil karya saya. Hal-hal yang bukan menjadi bagian dari karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum jelas pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 April 2022

Menyatakan

METERAI TEMPEL

Felinda Kusumawati

MOTTO

Man Jadda Wa Jada

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

Man Shobaro Zafiro

(Siapa yang bersabar akan beruntung)

Man Saaro ’Alaa Darbi Washola

(Siapa yang berjalan dijalur-Nya akan sampai)

Berhentilah menghawatirkan masa depan,

syukurilah hari ini, dan hiduplah dengan sebaik-baiknya,

percayalah usaha tidak akan pernah menghianati hasil.

(Felinda Kusumawati)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Segalanya. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Terimakasih Ya Allah untuk semua hari dalam hidup saya yang telah saya lalui dengan begitu berarti dan terimakasih telah menghadirkan orang-orang yang berarti yang berada disekeliling saya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita saya.

Dalam penyelesaian skripsi ini dengan kerendahan hati, saya persembahkan karya yang disusun dengan semangat dan penuh warna, yang amat saya banggakan ini kepada orang-orang yang begitu berarti. **DIRI SENDIRI**, terimakasih sudah mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih karena kamu selalu berusaha untuk melawan egomu dan pantang menyerah, terimakasih karena kamu telah melawan rasa malas yang selalu menghabatmu, terimakasih kamu sudah berhasil menjadi aktor dalam drama yang mewarnai masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian Skripsi ini. Saya mencintai kamu dan hasil karyamu ini.

Selanjutnya saya persembahkan kepada **ORANG TUA** saya. Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah mulai dari saya lahir sampai saat ini. Pertama dan paling utama saya ucapkan terimakasih banyak kepada Ibu saya **Wastinah**, terimakasih untuk dukungannya selama ini terimakasih untuk bentuk perhatian dan nasehatnya selama ini terimakasih untuk kasih sayang yang tak dapat digantikan dengan betuk apapun ini. Yang kedua saya persembahkan untuk Almarhum Bapak saya **Alm. Tugiran**, terimakasih sudah menjadi ayah terbaik di hidup saya, do'a terbaik untuk ayah semoga tenang di sisi-Nya. Yang ketiga saya persembahkan untuk Ayah sambung saya Bapak **Henry Margiyo Susanto**, terimakasih atas dukungannya kepada saya hingga saya bisa berada dititik ini, terimakasih untuk nasehat-nasehatnya selama ini, terimakasih telah ikhlas menyayangi dan memberikan perhatian yang begitu luar biasa untuk saya. Saya bangga dan sangat merasa bangga telah menjadi bagian dari kasih sayang kalian seumur hidup.

Selanjutnya saya persembahkan kepada **KEDUA SAUDARA** saya, Untuk **Fandi Wida Kusuma** dan **Ervin Yulianto**, terimakasih mas-mas ku atas dukungannya terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu mensupport adiknya ini saya tau kalian dua sosok yang tentu dengan kepribadian masing-masing, dan punya cara sendiri mendukung saya tapi tujuan kalian satu membantu si Bungsu ini meraih cita-citanya. Untuk Kakak Ipar dan Keponakan saya **Yustina Regina** dan **Nauval Okta**, terimakasih atas do'a dan dukungannya untuk saya.

Selanjutnya saya persembahkan kepada **DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK DAN SKRIPSI** saya, **Fatih Gama Abisono, S.IP., MA**. Terimakasih Pak Dosen yang paling baik dan bijaksana, terimaksih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di Kampus. Terimakasih atas bimbingan, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Lainya, saya persembahkan karya ini kepada **ALMAMATER TERCINTA STPMD "APMD" Yogyakarta**, terimakasih untuk memori setiap harinya di kampus ini, atas tawa yang setiap hari kita miliki dan atas solidaritas yang luar biasa, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada saya. Semua bentuk elemen dalam APMD baik semua Dosen, Pegawai, Teman-teman serta setiap sudut bangunan APMD begitu berarti bagi saya. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan paling indah didalam hidup saya.

Terakhir saya persembahkan Skripsi ini untuk para pembaca, selamat membaca, semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian kedepannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 21 April 2022

Penulis

Felinda Kusumawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkehendak dan memberikan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tuntas. Skripsi dengan judul "KELEMBAGAAN PENGELOLAAN COMMON POOL RESOURCE OLEH DESA DI KAPANEWON PRAMBANAN DAERAH PERBUKITAN DALAM MENGATASI MASALAH KRISIS AIR DI MASYARAKAT" mengantarkan Penulis untuk selalu mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata-1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Fatih Gama Abisono, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta motivasi bagi Penulis dalam membimbing Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Penguji Samping I Skripsi yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Dosen Penguji Samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama Penulis mengenyam pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama Penulis mengenyam pendidikan.

8. Seluruh Staff Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang kegiatan perkuliahan.
9. Bapak Giyatno selaku Ketua Organisasi Pengelola Pemakai Air Tirtomulyo dan seluruh masyarakat Kapanewon Prambanan yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan membantu dalam proses memperoleh data dan informasi terkait pengelolaan common pool resource atau sumber daya bersama air bersih.
10. Keluarga, Orang Tua saya beserta saudara-saudara Penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses pembuatan Skripsi.
11. Saudari Devi Ayu Saputri yang dengan ikhlas menerima curhatan keluh kesah saya dalam proses pembuatan Skripsi ini.
12. Saudari Putri Ayu Wulandari yang selalu dengan semangatnya dan ketekunannya mau berjuang dan ikut memotivasi saya untuk bersama-sama menyelesaikan Skripsi.
13. Saudari Aminah dan Qurnia Fatimah yang selalu semangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan banyaknya halangan yang menguji kesabaran dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
14. Dan yang terakhir, kepada semua teman-teman lainnya yang turut serta mewarnai masa perkuliahan dan ikut serta menanyakan progres Skripsi Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya yang membutuhkan informasi yang bertemakan sama dengan Skripsi yang Penulis tulis.

Yogyakarta, 21 April 2022

Penulis

Felinda Kusumawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL v

HALAMAN PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

INTISARI xv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Literatur Review 7

F. Kerangka Konseptual 15

1. Desa..... 15

2. *Common Pool Resources* (Sumber Daya Bersama)..... 19

G. Kerangka Pikir Penelitian 26

H. Metode Penelitian 27

a. Jenis Penelitian 27

b. Tempat dan Waktu Penelitian 28

c. Metode Pengumpulan Data 29

d. Metode Analisis Data 34

BAB II 36

LANSKAP KAWASAN PERBUKITAN KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 36

A. Kondisi Geografis Kapanewon Prambanan 36

B. Kondisi Demografis Kapanewon Prambanan Daerah Perbukitan 38

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 38

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 40

3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 42

C. Kondisi Sosial Budaya Kapanewon Prambanan 43

D. Pemerintahan 46

E. Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo 48

1. Tahap Pembangunan 49

2. Kedudukan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) 49

3. Struktur Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo 50

4. Kegiatan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo 50

5. Peta Jaringan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo 51

BAB III 52

PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCE* DALAM MENGATASI KEKERINGAN DI KAPANEWON PRAMBANAN KAWASAN PERBUKITAN 52

A. Identifikasi Pemetaan Wilayah Kekeringan di Kapanewon Prambanan 52

B. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Kekeringan di Kapanewon Prambanan Daerah Perbukitan 55

1. Subsidi Pemerintah 56

2. Droping Air Menggunakan Tangki oleh Swasta 58

3. Program PAMSIMAS 59

4. Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) 61

C. Relasi antara Pemerintah Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo, dan Masyarakat Pemakai Air Dalam Pengelolaan Air Bersih (Sumber Daya Bersama/ *Common Pool Resource*) 63

D. Pola Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Bersama/ *Common Pool Recouce* Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kapanewon Prambanan Daerah Perbukitan 72

BAB IV 78

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCE* OLEH DESA SAMBIREJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN 78

A. Kelembagaan Pengelolaan *Common Pool Resource* 78

B. Analisis Relasi antara Pemerintah Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA), dan Masyarakat Pemakai Air 85

BAB V 90

KESIMPULAN DAN SARAN 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTKA 94

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Teknik Pengumpulan Data…….…….30

Tabel 2.1 Tata Guna Lahan…….37

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin……..39

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan……..40

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan…….....42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pengelolaan *Common Pool Resource* Oleh Desa……25

Gambar 2.1 Peta wilayah Kapanewon Prambanan……..36

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo…….47

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo……50

Gambar 2.4 Peta Jaringan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo……51

Gambar 3.1 Pola Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Bersama……..72

INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* dalam konteks pengelolaan air bersih oleh Desa. Penelitian ini berangkat dari kurangnya ketersediaan air bagi warga Prambanan yang tinggal di daerah perbukitan, hal ini terutama terjadi ketika memasuki musim kemarau. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bagi warga Prambanan yang tinggal di daerah perbukitan. Penanganan krisis air di Prambanan memang memerlukan komitmen dan langkah bersama berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Langkah bersama ini harus diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan air secara berkesinambungan dan menjangkau masyarakat di Prambanan daerah perbukitan sepanjang waktu.

Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* dalam hal ini adalah pengelolaan air bersih oleh desa dalam mengatasi masalah kekeringan, dan juga menganalisis kelembagaan untuk melihat peran, permasalahan, struktur organisasi, regulasi, dan relasi antara Pemerintah Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo, dan Masyarakat Pemakai Air dalam pengelolaan air bersih (Sumber Daya Bersama/ *Common Pool Resource*). Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman terkhusus di Kalurahan Sambirejo seperti yang telah dijelaskan Kapanewon Prambanan khususnya di daerah perbukitan sering terjadi kekeringan setiap tahunnya hal ini terjadi ketika memasuki musim kemarau. Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi terkait data yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya yaitu studi kasus kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapat, maka dapat dilihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kekeringan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan namun dalam berjalannya waktu beberapa upaya yang sudah dilakukan tidak bisa dikatakan efektif dan bukan merupakan solusi untuk mengatasi masalah kekeringan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan karena pendistribusian air bersih tidak merata sehingga menimbulkan banyak konfik dalam pendistribusiannya. Tetapi setelah organisasi pengelola air bersih di serahkan ke Desa/Kalurahan Sambirejo dimana pengelolaan tersebut pendistribusian airnya lebih merata untuk masyarakat.

Kesimpulannya, didalam pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* ini terjalin relasi yang sangat baik antara Pemerintah Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA), dan Masyarakat Pemakai Air sehingga Desa merupakan institusi yang tepat untuk mengelola sumber daya bersama atau *common pool resource* karena dalam pendistribusiannya lebih merata untuk masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan air bersih oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo ini beban pemerintah dalam mengatasi masalah kekeringan dan pemenuhan kebutuhan pokok air bersih masyarakat dapat teratasi.

Kata Kunci : *Common Pool Resource*, Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ini hendak mengkaji terkait *common pool resource* atau sumber daya bersama dalam konteks pengelolaan air bersih yang dijadikan unit pelayanan air bersih yang ada di desa. Unit pelayanan air bersih di desa tersebut dikelola oleh masyarakat desa dengan diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA). Hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurangnya ketersediaan air bagi warga Prambanan yang tinggal di atas perbukitan. Kajian ini juga menganalisis kelembagaan untuk melihat peran, permasalahan, struktur organisasi, regulasi, dan relasi antara Pemerintah Desa dengan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA). Wilayah Kapanewon Prambanan bagian perbukitan selama ini sering mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air, hal ini terutama terjadi ketika memasuki musim kemarau. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bagi warga Prambanan yang tinggal di atas perbukitan. Penanganan krisis air di Prambanan memang memerlukan komitmen dan langkah bersama berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Langkah bersama ini harus diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan air secara berkesinambungan dan menjangkau masyarakat sepanjang waktu.

Common Pool Resources (CPR) merupakan sistem sumber daya alam maupun buatan manusia yang dimanfaatkan bersama oleh kelompok pengguna. Contoh sistem sumber daya misalnya, sumber air, pertambangan, tanah pertanian, ladang gembala,

danau, hutan, laut, tambak, irigasi (Ostrom, 1990). *Common pool resources* adalah sumber daya yang bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi memberikan manfaat yang berkurang bagi setiap orang jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri. Sumberdaya air merupakan sumber daya alam yang tidak hidup (*abiotik*) namun dapat diperbaharui (*renewable resources*). Air adalah salah satu sumber alam paling penting bagi makhluk hidup namun sering menjadi permasalahan dalam keberadaannya (*occurance*), peredaran/sirkulasinya (*circulation*) dan penyebarannya (*distribution*).

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi semua manusia. Karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Dalam kehidupan manusia air digunakan dalam berbagai keperluan seperti: keperluan mck (mandi, cuci, kakus), memasak makanan, minum, dan keperluan lainnya. Apabila manusia kesulitan dalam memperoleh dan mengakses air bersih, maka akan berdampak kepada keberlangsungan hidup manusia tersebut, karena pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka adalah hal yang wajar jika sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berisi bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber

daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya air memiliki karakteristik sebagai sumber daya bersama (*common pool resources*) yang memiliki tantangan tersendiri. Keberadaan *common pool resources* yang bersifat *open to all*, menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi pengguna untuk mengakses sumber daya bersama sehingga para pengguna tidak dapat melarang pengguna lainnya namun timbul persaingan di antara para pengguna tersebut (Wade dikutip Agung, dkk, 2019).

Untuk memaksimalkan distribusi air di Kapanewon Prambanan, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) merencanakan pembentukan Unit pelayananyang bergerak di bidang air bersih. Di Kapanewon Prambanan terdapat tiga sumber mata air yaitu Sistem Prambanan 1, Sistem Prambanan 2 dan Sistem Prambanan 3 namun pada perjalanannya Sistem Prambanan 2 dan 3 bermasalah dan akhirnya dikelola oleh PDAM, saat ini khususnya di Kalurahan Sambirejo memakai Sistem Prambanan 1 yang dijadikan Unit pelayananyang bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih atas kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) dan diharapkan distribusi air bersih ke warga akan berjalan maksimal. Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) adalah organisasi pengelola air bersih pedesaan non PDAM dan mempunyai konsep yang mengacu peran dan tanggungjawab dalam pelayanan terhadap kebutuhan air di wilayahnya. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 204/KEP/2008 tentang Pengukuhan Paguyuban Air Minum

Masyarakat Yogyakarta atau disebut PAM-MASKARTA. Organisasi ini merupakan stakeholders yang harus ditingkatkan keberdayaannya dalam pengembangan swadaya masyarakat, dikarenakan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang sangat dekat dengan komunitas yang akan diberdayakan melalui capacity building. Mereka bekerja secara sukarela, tidak memikirkan upah yang didapatkannya, karena untuk kepentingan umum.

Keberadaan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) di Kapanewon Prambanan ternyata belum dapat menjangkau seluruh Kepala Keluarga (KK) di Kapanewon Prambanan pada tahun 2018. Oleh karena itu membuat ratusan KK di Kapanewon tersebut masih menggantungkan bantuan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Belum terjangkaunya jaringan OPPA di Kapanewon Prambanan ada sekitar 300-350 KK yang bertempat tinggal antara lain di Kalurahan Gayamharjo, Wukirharjo, Sambirejo, dan Sumberharjo, dimana daerah tersebut notabenenya daerah perbukitan dan karena itulah membuat ratusan KK di daerah tersebut masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Sehingga warga perlu membeli air dengan menggunakan mobil tangki selama musim kemarau, dimana harga air bersih bisa mencapai 150 ribu rupiah per 5 kubik.

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan sanitasi juga telah dituangkan dalam suatu target *Millenium Development Goals* (MDGs). Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga telah berkomitmen untuk melaksanakan target dalam MDGs tersebut. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya SDGs nomor 6

yaitu berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan tanggungjawab yang seringkali berada di bawah pemerintah daerah, dan sangat bergantung pada pemerintahan yang efektif. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas air melalui langkah-langkah perlindungan lingkungan hidup. Manajemen sumberdaya air yang terpadu membutuhkan kerjasama dalam perencanan dan kebijakan lingkungan antara daerah yang berdekatan. Pemerintah memiliki posisi strategis untuk mendukung pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis partisipasi oleh masyarakat.

Target yang ingin dicapai dalam menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua yaitu antara lain pada tahun 2030, dapat meraih akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan zat berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan meningkatkan praktik daur ulang dan penggunaan ulang yang aman dalam jumlah substansial secara global, meningkatkan penggunaan air yang efisien secara substansial di semua sektor dan menjamin penyediaan dan pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air secara subsansial, serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.

Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Terutama Unit pelayananyang ada di Desa merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial

ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Unit pelayananyang ada di Desa merupakan sebuah badan usaha yang penyertaannya berasal dari desa dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pendirian Unit pelayananyang ada di Desa menjadi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pendirian unit pelayananpengelolaan air bersih di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan yang dikelola oleh masyarakat atau swadaya masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam kajian ini yaitu : Mengapa desa menjadi institusi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah hendak menjelaskan bahwa desa merupakan institusi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* dimana Pemerintah Desa dan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) sebagai faktor yang menentukan keberhasilan pemanfaatan *common pool resource* dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kajian ini juga bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan penunjang keberlanjutan pemanfaatan *common pool resource* di masa yang akan datang dalam mengatasi masalah kekurangan air di desa-desa di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman khususnya di daerah perbukitan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah di dalam pengelolaan *common pool resource* atau sumber daya bersama khususnya dalam kajian ini yaitu sumber daya air yang sampai sejauh ini masih belum banyak ditemukan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo dan Pemerintah Kalurahan di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan *common pool resource* atau sumber daya bersama khususnya dalam kajian ini yaitu sumber daya air.

E. Literatur Review

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa hadir sebagai representasi mandat konstitusi tersebut. Desa ditetapkan empat kewenangan yakni menyelenggarakan, membangun, memberdayakan, dan membina masyarakat desa. Yang berarti pemerintah desa berhak untuk mengatur dan mengurus bagian dari hak dan kewenangan desa dan kewenangan lokal berskala desa termasuk mengelola sumber daya milik bersama atau *common pool resaurces* ketika sumber daya bersama atau *common pool resource* tersebut berada di desa.

Ada beberapa pandangan terkait institusi terbaik dalam pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource*. Konsep sumber daya bersama atau *common pool resource* harus dipahami sebagai barang publik Barang dapat dikatakan sumber daya milik bersama apabila memenuhi keterbatasan atau subtraktif dalam konteks barang publik. Apabila pengunaan *common pool resource* tidak diatur dan dikelola secara bersama maka rentan menimbulkan konflik. Garet Hardin menjelaskan tragedi bersama terjadi akibat dari absenya hak kepemilikan dan otoritas yang tinggi mengakibatkan over eksploitasi. Oleh karena itu lebih baik diprivatisasi atau diserahkan kepada tangan negara (Hardin dikutip Sakro, 2020). Berbeda, Elinor Ostrom mengajukan *common pool resource* dikelola komunitas untuk menghindari tragedi bersama (Ostrom dikutip Sakro, 2020).

Konsep institusi pengelola *common pool resource* disini mengacu pada institusi formal dengan institusi alamiah di desa. Dua padangan ini memunculkan perdebatan antara yang substansial dan normatif (Nugroho, dkk., 2017). Pandangan normatif berpijak pada status formal. Dengan kata lain institusi mempegaruhi masyarakat bukan masyarakat mempegaruhi institusi. kemudian Hodgson menambahkan bahwa institusi tidak hanya dilihat sebagai aturan atau norma maupun perilaku atau kebiasaan (*habit*) yang ada dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan entitas lainnya. Namun, institusi juga merupakan suatu sistem yang sudah mapan dimana aturan-aturan sosial yang tertanam turut memengaruhi interaksi sosial (Nugroho, dkk., 2017). Pandangan alamiah ini menempatkan realitas mempegaruhi institusi. Karakteristik institusi semacam ini tumbuh secara alamiah. Biasanya berpijak pada kepentingan bersama dengan

mengandalkan prakarsa lokal. Norma, aturan, dan desain kelembagaan dibentuk berdasarkan kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan *common pool resources* yang baik dan bekelanjutan dibutuhkan institusi. Kata institusi merupakan aturan yang manusia gunakan ketika berinteraksi di dalam situasi berulang dan terstruktur di berbagai tingkat analisis (Ostrom dalam Fleischman et al, 2014). Selain itu, upaya privatisasi pengelolaan oleh pemerintah dan kontrol pemanfaatan oleh masyarakat lokal juga diperlukan (Healy dalam Fleischman et al, 2014). Patriana, dkk (2016) didalam jurnalnya menjelaskan adanya perubahan ritual perlindungan sumberdaya komunal terhadap sumberdaya *privat* dan bersama yang diatur melalui rezim kontrol agro-ekologi pemerintah, hingga suatu cara komersialisasi dan privatisasi besar-besaran untuk menghindari pencurian. Mulyono, (2019) juga menjelaskan terkait pemanfaatan *common pool resource* atau sumber daya air yang dipandu oleh prinsip efisiensi ekonomi dalam penyusunan pola termasuk prioritas pemanfaatan. Pengaturan kebijakan air yang baik sangat diperlukan dalam langkah privatisasi air, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap negara yang mempraktekannya, dalam hal ini regulasi pemerintah sangatlah berperan penting dalam pembatasan penerapan air, seperti yang dilakukan oleh Inggris. Namun tidak dengan Kustanti, dkk (2014) yang menjelaskan bahwa hak kepemilikan privat yang memberikan otonomi penuh bagi pengelola, terbukti tidak mampu menjamin keberlanjutan pengelolaan usaha tambak dengan cara mengkonversi hutan mangrove. Sebagian besar hutan mangrove yang ada di Indonesia adalah hutan mangrove dengan karakteristik sebagai sumberdaya milik bersama (*Common Pool Resources/CPRs*). Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ostrom yang meragukan apakah untuk sumberdaya alam milik

bersama, seperti hutan *mangrove* yang telah dikonversi menjadi areal pertambakan akan menjamin keberlangsungan pengelolaan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan adanya keleluasaan penuh (otonomi penuh) bagi pemiliknya untuk menguasai, memanfaatkan, dan bahkan memindahtangankan hak (*transfer of right*) (Ostrom dalam Sakro, 2020)

Perubahan makna air dari barang publik menjadi barang ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk menghindari terjadinya *tragedy of the commons* Hardin yaitu terjadinya kerusakan sumber daya karena keinginan semua pihak untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, maka dari itu status kepemilikan akses terbuka (*open acces property*) perlu dialihkan menjadi kepemilikan swasta (*privat property*) (Hardin dalam Fleischman et al, 2014) . Privatisasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan solusi dari kegagalan publik mengelola sumber daya air secara efektif dan efisien. Penyerahan penguasaan pengelolaan sumber daya air kepada swasta juga menutup akses masyarakat terhadap sumber daya air tersebut. Perusahaan-perusahaan mendapatkan keuntungan dari naiknya permintaan terhadap air sementara masyarakat kehilangan haknya atas air dan kehilangan mata pencaharian (Shiva 2002). Putri dan Sihaloho (2018) menjelaskan bahwa Sumber daya air merupakan bagian dalam sistem ekologi. Sebagai suatu sistem ekologi, sumber daya air memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan sistem sosial dan berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Sumber daya air memiliki karakteristik sebagai sumber daya bersama atau *common pool resources* yang memiliki tantangan tersendiri. Keberadaan *common pool resources* yang bersifat *open to all*, menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi pengguna untuk

mengakses sumber daya bersama sehingga para pengguna tidak dapat melarang pengguna lainnya namun timbul persaingan di antara para pengguna tersebut (Wade dikutip Sakro, 2020).

Selain pengelolaan privatisasi ada pula yang berpendapat bahwa pengelolaan komunitas merupakan institusi yang tepat dalam mengelola *Common Pool Resource*. Maryati, dkk., (2018) menjelaskan terkait Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum mendorong penerapan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh kelompok masyarakat, salah satunya dalam bentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam). Pengelolaan sistem penyediaan air minum berbasis komunitas berpotensi untuk dilihat dari sudut pandang pengelolaan barang milik bersama (*common pool resources/CPR*). *CPR* didefinisikan sebagai barang yang sulit namun memungkinkan untuk mendefinisikan penggunanya dan mengeluarkan pengguna lainnya. Lebih lanjut, dalam *CPR* penggunaan barang oleh seseorang dapat mengurangi manfaat pengguna lain (Ostrom dikutip Sakro, 2020). Budiyarto (2017) juga menjelaskan pengelolaan berbasis komunitas yaitu mangrove yang merupakan salah satu sumberdaya alam dan salah satu "*Common Pool Resources/CPR*" yang sangat penting karena menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan mangrove yang telah terbukti sukses di berbagai wilayah baik di dalam negeri maupun mancanegara menunjukkan bahwa komunitas masyarakat lokal di sekitar ekosistem *mangrove* memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan ekosistem tersebut. Menurut kajian yang dilakukan olah Agung, dkk., (2019) juga menganut pemikiran Ostrom yang mengajukan *common pool resources* dikelola oleh komunitas, dimana kajian ini

menjelaskan bahwa Germadan merupakan salah satu bentuk kebijakan pengelolaan danau yang dilaksanakan melalui pembentukan kelembagaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening merupakan tindakan bersama untuk kelestarian Danau Rawa Pening. Danau merupakan salah satu bentuk *CPR (Common Pool Resources)* yang keberhasilan pengelolaannya sangat tergantung pada kualitas kelembagaan pengelolaannya. Kelembagaan tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas dan masyarakat yang tergantung kepada danau tersebut (Satia & Retnandari, 2016).

Pengelolaan *common pool resource* menghadapi tantangan berupa over eksploitasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya alam (Nursidah, dkk 2012). Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan pengelolaan *CPR* dapat dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah *(top down)* maupun inisiatif masyarakat *(bottom up)*. Pengakuan dan penggabungan institusi lokal dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam karena institusi lokal mempunyai potensi *collective action (CA)* yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan *CPR* yang lestari (Nursidah, dkk 2012). *Collective action (CA)* secara umum dapat diartikan sebagai tindakan bersama sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Barnaud, dkk 2018; Schroeder, 2013).

Sedangkan dalam kajian Sakro (2020) menjelaskan tentang pengelolaan *CPR* berbasis masyarakat (Pokdarwis) yang berpijak pada pemikiran Ostrom berusaha untuk menjadi jembatan antara negara, swasta dan lokal berupa program desa wisata. Namun, realitasnya praktik dan tindakan Pokdarwis malah menjelma menjadi penguasa *common*

pool resource (CPR). Hal ini terjadi karena Pokdarwis meninggalkan desa. Praktik ini melahirkan privatisasi atas *common pool resource. (CPR).* Buahnya konflik vertikal dan konflik horizontal. Tragedi Ini terjadi karena Pokdarwis bukan milik desa tetapi milik swasta yang dikendalikan melalui tekno-adminstratif melalui struktur birokrasi supradesa. Pemerintah desa dan masyarakat malah diabaikan. Realitas ini sekaligus mengatakan bahwa teori Garet Hardin tentang privatisasi *common pool resource (CPR)* tidak relevan dan kontekstual ketika diterapkan di negara yang memiliki tradisi berdesa. Hak kepemilikan privat malah menyumbang tragedi baru berupa konflik juga terjadi di Telaga Jonge Desa Pacarejo. Hasil dan temuan dalam penelitian ini malah berbanding terbalik. Ditengah negara absen, pemerintah desa hadir untuk mendistribusikan *common pool resource (CPR)* secara adil. Peran sentral pemerintah desa berusaha mematahkan nalar, tindakan swasta dan institusi berbasis masyarakat (Pokdarwis) yang melahirkan privatisi dan sengketa di Telaga Jonge. Pemerintah desa dan kepala desa sebagai mandat rakyat menempuh rekayasa sosial untuk meyakinkan pengelola dan mengakomodasi sengketa. Buahnya pemerintah desa mampu meyakinkan pengelola dan bekerjasama dengan pengelola. Hak kepemilikan *common pool resource (CPR*) di kembalikan ke desa.

Dalam tataran realita konsep kolaborasi institusi Ostrom diterjemahkan menjadi paradigma pembangunan berbasis masyarakat/ *community driven development.* Sebagaimana diterapkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / PNPM Mandiri (Carroll, 2012: 63). Secara khusus PNPM mengorientasikan komunitas sebagai pengelola dana program di desa. Saunders (2014) teori *common pool resource* milik Ostrom mengalami penyederhanaan dari kelembagaan lokal menjadi kelembagaan formal

dalam proyek bersama. Proyek-proyek milik bersama, seperti manajemen sumber daya alam berbasis masyarakat merupakan adaptasi yang disederhanakan oleh beberapa organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga pembangunan tentang penerimaan yang meluas dan janji untuk memberikan kontrol sumber daya kepada kelompok-kelompok dan individu-individu. Model program ini lahir sebagai bentuk revisi atas pembangunan perdesaan terpadu/ *integerated rural development* yang digerakan oleh negara *(state led)* dan kemudian dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam PNPM mandiri (Eko, Sutoro dkk., 2017: 65).

Kajian penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian review diatas karena dalam kajian ini hendak menjelaskan mengapa desa merupakan institusi terbaik untuk mengelola *common pool resource,* karena dengan dikelola desa beban pemerintah dalam mengatasi masalah air ini dapat teratasi. Pengelolaan *common pool resource* memang lebih baik dikelola oleh desa. Aksi kolektif desa merupakan institusi yang menyebar kemudian menyatukan diri dengan membentuk dewan desa. Seperti pendapat yang diajukan oleh Robert Wade dimana institusi ini muncul atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama untuk menyediakan barang milik bersama tanpa intervensi negara (Wade dikutip Sakro, 2020). Desa menjadi institusi pengatur, mengurus, dan mengelola *common pool resource* untuk kebaikan bersama. Pada konteks ini penghargaan terhadap otoritas lokal dan struktur sosial merupakan nilai terpenting untuk membentuk institusi yang melampaui komunitas, dusun, pluralisme yang diikat oleh otoritas desa bernama kolektivisme pluralistik (Geertz dalam Fleischman et al, 2014).). Keberhasilan ini ditunjukan Wade melalui studinya di desa-desa di India (Wade dikutip Sakro, 2020). Institusi yang berhasil jauh dari intervensi negara dan organisasi yang rumit tetapi

mengandalkan kerjasama antar penduduk desa sesuai dengan konteks desa. Otoritas pengelola *common pool resource* berada di tangan desa yang bertugas mengatur, mengurus, dan mengelola *common pool resource*.

F. Kerangka Konseptual

Untuk membedah persoalan di atas secara menyeluruh tentu dibutuhkan sebuah kerangka konseptual yang lebih memadai. Dalam kerangka konseptual ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar terlebih dahulu mengenai Desa dan *Common Pool Resources* (Sumber Daya Bersama).

1. Desa

Kata desa awalnya berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Kemudian istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan *(urban).* Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristtik masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa (Numan, 2015).

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut *village* (Rahayu, 2018).

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa :

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Para ahli dalam bidang desa memberikan pengertian atau batasan yang berbeda-beda mengenai desa, namun demikian dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli tentang pengertian desa :

1. Bintarto memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota.
2. Roucek dan Waren mengemukakan ciri-ciri pedesaan sebagai berikut: 1) Masyarakat desa bersifat homogen, dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku; 2) Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. 3) Faktor geografis besar pengaruhnya terhadap kehidupan; 4) Hubungan antara sesama anggota masyarakat lebih intim/akrab dari pada di kota.

3. Paul H. Landis memberikan definisi desa sebagai berikut: 1) Untuk kepentingan statistik, desa adalah tempat tinggal penduduk dengan jumlah kurang dari 2.500 orang; 2) Untuk kajian psikologi sosial, desa adalah daerah-daerah yang penduduknya ditandai dengan derajat keakraban/intimitas yang tinggi; 3) Untuk kajian ekonomi desa merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi mayoritas agraris.
4. W.S. Thompson dalam Population Problem mengemukakan bahwa desa merupakan salah satu tempat untuk menampung penduduk.
5. William Ogburn and M.F. Nimkoff dalam A Handbook of Sociology mengemukakan bahwa desa, yaitu organisasi atau kumpulan kehidupan sosial, dalam suatu daerah yang terbatas.

Setelah memahami definisi dan pengertian tentang Desa baik menurut para ahli, maka dapat di simpulkan bahwa, Desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota, adanya *homogenitas* pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencaharian yaitu mayoritas agraris, nilai kebudayaan maupun tingkah laku, hubungan antar penduduk yang akrab. Desa merupakan satu kesatuan wilayah tempat tinggal masyarakat hukum dengan kewenangan mengurus pemerintahan atas inisiasi masyarakat guna mengembangkan potensi dan kekayaan baik ekonomi dan budaya yang ada secara mandiri namun dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Desa adalah satu bagian dari asal usul, satu wilayah yang menjadi tempat tinggal, kehidupan bermasyarakat, dan pemenuhan kehidupan

secara ekonomi, dalam batasan wilayah tertentu yang memiliki ciri atau identitas asal usul dan tradisional dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.

Desa mempunyai kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten (Widjaja, 2007). Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau intitusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetisi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnyakedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara (Ridwan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19, kewenangan desa meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
b. Kewenangan lokal berskala desa.
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai mandat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah mengakui dan menghormati kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. Dengan kewenangan ini pula diyakini akan menjadi pondasi bagi kemandirian desa, yaitu desa yang berkuasa penuh atas aset-aset yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak dasar dan penghidupan desa secara berkelanjutan. Sementara itu, berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, mengamanatkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Peraturan kepala daerah tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk selanjutnya menjadi acuan bagi Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. *Common Pool Resources* (Sumber Daya Bersama)

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini telah mengingatkan bahwa, keberadaan kekayaan alam diutamakan untuk kepentingan hajat orang banyak. Pertama pemerintah hadir untuk mengatur, mengelola dan merawat sumber daya alam. Hal ini bertujun untuk mendistribusikan keadilan kepada

rakyat secara adil dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa hadir sebagai representasi mandat konstitusi tersebut. Desa ditetapkan empat kewenangan yakni menyelenggarakan, membangun, memberdayakan, dan membina masyarakat desa. Yang berarti pemerintah desa berhak untuk mengatur dan mengurus bagian dari hak dan kewenangan desa dan kewenangan lokal berskala desa termasuk mengelola sumber daya milik bersama atau *common pool resaurces* ketika sumber daya bersama atau *common pool resource* tersebut berada di desa.

Konsep barang milik bersama/*commons pool resaurces (CPR)* harus dipahami sebagai sub bagian dari barang-barang publik. Barang dapat dikatakan sumber daya milik bersama apabila memenuhi keterbatasan atau subtraktif dalam konteks barang publik. Misalnya analogi Wade jika A menggunakan lebih banyak, lebih sedikit sisa untuk yang lain (Wade dikutip Agung, dkk., 2019). Apabila pengunaan *CPR* tidak di-atur dan dikelola secara bersama rentan membawa konflik. Pada konteks ini *CPR* biasanya berpotensi mengalami kemacetan, penipisan, atau degradasi, yaitu penggunaan yang didorong melampaui batas hasil yang berkelanjutan (Blomquist dan Ostrom; Randali, Wade, dikutip Agung, dkk., 2019). Garet Hardin menjelaskan tragedi bersama terjadi akibat dari absenya hak kepemilikan dan otoritas yang tinggi mengakibatkan *over eksploitasi*. Oleh karena itu lebih baik diprivatisasi atau diserahkan kepada tangan negara (Hardin, dikutip Sakro, 2020) Berbeda, Elinor

Ostrom mengajukan term (CPR) dikelola komunitas untuk menghindari tragedi bersama (Ostrom dikutip Sakro, 2020).

Meninjau lebih lanjut tentang sumber daya bersama (*common pool resources*), maka secara otomatis akan membawa ranah pembahasan pada dilema pengelolaan yang dikenal sebagai istilah *common dilemma*. *Common dilemma* merupakan salah satu fenomena dalam pembangunan yang terjadi akibat adanya masalah dalam pengelolaan *common pool resources*. Keberadaan *common pool resources* yang bersifat "*open to all*", menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi para pengguna untuk mengakses sumber daya bersama sehingga para pengguna tidak dapat melarang pengguna lainnya namun timbul persaingan di antara para pengguna tersebut (Blomquist dan Ostrom, dalam Fleischman et al, 2014). Implikasi dari "*open to all*" dalam pengelolaan *common pool resources* ini yang kemudian disebut *common dilemma*. *Common dilemma* dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi yang terjadi saat sumber daya mulai terbatas sehingga ada indikasi salah satu pengguna mengeksploitasi sumber daya lebih cepat dari pengguna lainnya atau menghalangi pengguna lainnya untuk menggunakan sumber daya (Gifford dalam Fleischman et al, 2014).

Topik *common pool resources* dan *common dilemma* sebenarnya dimulai sejak adanya *The Prisoners' Dilemma* dan *Tragedy of The Commons* yang dikenalkan oleh Hardin (1968). Namun, hingga kini topik pembahasan ini seperti tidak akan ada habisnya selama proses pembangunan dan pemanfaatan sumber daya terus berjalan terutama pada negara-negara berkembang (Sargeson, 2002). Pada penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa *common dilemma* sangat beragam dan

dinamis karena sulitnya untuk mempertemukan hasil yang diinginkan oleh semua pengguna (Ostrom, Walker, dan Gardener, dalam Fleischman et al, 2014). Seiring dengan perkembangan zaman, *common dilemma* juga dihadapkan dengan persoalan globalisasi dan masalah pengelolaan yang lebih kompleks. Jika dikaitkan kembali dengan kompleksitas pengelolaan sumber daya air, maka pembahasan *common dilemma* dalam pengelolaan sumber daya air menjadi hal yang menarik. Wade juga berpendapat bahwa ada tiga *common pool resources* yang paling krusial di negara berkembang, salah satunya yaitu air. Pada dasarnya, konflik tersebut terkait dengan kelembagaan. Ostrom dan Gifford berpendapat bahwa faktor kelembagaan memegang peranan penting dalam pengelolaan *common pool resources* termasuk pertimbangan karakteristik dari sumber daya itu sendiri (Ostrom dan Gifford dalam Fleischman et al, 2014).

Konsep institusi pengelola CPR disini mengacu pada institusi formal versus institusi alamiah di desa. Dua padangan ini memunculkan perdebatan antara yang substansial dan normatif (Nugroho, dkk, 2017). Pandangan normatif berpijak pada status formal. Heywood (2013: 25) mendefenisikan institusi merupakan sebuah badan yang kukuh dengan sebuah peran dan status formal; lebih luas, serangkaian aturan yang menjamin perilaku yang teratur dan dapat diprediksi. Singkat kata, institusi mempegaruhi masyarakat bukan masyarakat mempegaruhi institusi.

Sementara Hodgson mendefenisikan institusi:

> *"…social rule-systems, not simply rules. Institutions are systems of established and embedded social rules that structure social interactions."* Hodgson kemudian menambahkan bahwa institusi tidak hanya dilihat sebagai aturan atau norma maupun perilaku atau kebiasaan (habit) yang ada dalam diri

> seseorang, suatu organisasi, dan entitas lainnya. Namun, institusi juga merupakan suatu sistem yang sudah mapan dimana aturan-aturan sosial yang tertanam turut memengaruhi interaksi sosial (Nugroho, et al. 2017: 304).

Pandangan alamiah ini menempatkan realitas mempegaruhi institusi. Karakteristik institusi semacam ini tumbuh secara alamiah. Biasanya berpijak pada kepentingan bersama dengan mengandalkan prakarsa lokal. Norma, aturan, dan desain kelembagaan dibentuk berdasarkan kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat setempat (Sakro, 2020).

Ostrom dalam karyanya *Governing The Commons; The Evolution of Institusion for Collective Actions* berusaha menjembatani antara komunitas lokal, swasta, dan negara dalam mengelola *CPR*. Atas dasar itu Ostrom mengajukan delapan desain yang harus dipenuhi institusi untuk mengatur dan mengelola *CPR* agar efektif; Pertama, memperjelas identitas kelompok pengelola *CPR*. Kedua, manfaat dan biaya yang dikeluarkan, Ketiga, kepengaturan berpijak pada pilihan kolektif. Keempat, perlu ada pengawasan agar tidak terjadi pencurian dan eksploitasi. Kelima sanksi diawal berupa teguran kecuali melampaui batas. Keenam, mekanisme penyelesaian konflik harus ditempuh melalui cara yang dianggap adil. Ketujuh, perlu ada pengakuan atas hak berorganisasi. Kedelapan, untuk kelompok yang lebih besar harus ada koordinasi yang tepat antara kelompok yang dianggap relevan. Ostrom menekankan pada komunitas lokal homogen (Sakro, 2020).

Pada penelitian ini, wilayah Kapanewon Prambanan bagian perbukitan selama ini sering mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bagi warga Prambanan yang tinggal di atas perbukitan. Penanganan krisis air di Prambanan memang memerlukan komitmen dan langkah bersama berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Langkah bersama ini harus diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan

air secara berkesinambungan dan menjangkau masyarakat sepanjang waktu. Menurut Kodoati dan Sjarief (2010) Air merupakan sumber daya alam yang paling unik jika dibandingkan dengan sumber daya lain karena sifatnya yang terbarukan dan dinamis. Artinya sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang pada musimnya sesuai dengan waktu. Namun, pada kondisi tertentu air bisa bersifat tak terbarukan, misal pada kondisi geologi tertentu dimana proses perjalanan air tanah memerlukan waktu ribuan tahun, sehingga bila pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan, air akan habis (Kodoatie dan Roestam, 2010). Untuk memaksimalkan distribusi air di Kecamatan Prambanan, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) merencanakan pembentukan Unit pelayananyang bergerak di bidang air bersih. Dengan adanya Unit pelayanandalam bidang pengelolaan air bersih ini diharapkan mampu memenuhi segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun yang memerlukan air bersih. Air bersih merupakan salah satu satu kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Dalam kehidupan, manusia air digunakan dalam berbagai keperluan seperti: untuk keperluan mck, memasak makanan, minum, dan keperluan lainnya.

Pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks. Air yang memiliki nilai vital pada tatanan kehidupan sosial-budaya, ekonomi serta lingkungan cenderung saling bertentangan (Rustiadi, dkk., 2011). Sejak adanya pergeseran paradigma air sebagai komoditas sosial menjadi komoditas ekonomi, sistem kebijakan nasional juga berubah. Kerangka kebijakan sumber daya air mulai memberikan peluang penguasaan sumber-sumber air bagi badan usaha dan individu. Hal ini menjadi suatu yang kontras dan *dilematis* ketika sistem kebijakan tersebut berlaku pada tatanan

masyarakat lokal yang cenderung menggantungkan hidupnya pada sumber air yang ada. Ditambah lagi pada kondisi sumber daya air yang makin terbatas. Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga tidak dapat dipisahkan dari teori kepemilikan sumber daya alam yang membagi barang atau sumber daya menjadi empat tipe yaitu *privat, publik, common* dan *club*. Dari keempat tipe tersebut, sumber daya yang berwujud ”barang bersama” (*common good*) sangat rentan memicu permasalahan antar kelompok yang menggunakan. Pada akhirnya, tipe sumber daya tersebut akan mempengaruhi dinamika pengelolaan yang ada (Rustiadi, dkk, 2011).

Menurut Robert Wade *Common Pool Resource* lebih baik dikelola dengan aksi kolektif desa. Aksi kolektif merupakan institusi yang menyebar kemudian menyatukan diri dengan membentuk dewan desa. Institusi ini muncul atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama untuk menyediakan barang milik bersama tanpa intervensi negara. Dalam *foot note* Wade menulis dewan desa sepenuhnya dibentuk oleh penduduk desa untuk diri mereka sendiri dan tidak mendapatkan otoritas dari negara (Wade dalam Sakro, 2020). Desa menjadi institusi pengatur, mengurus, dan mengelola *Common Pool Resource* untuk kebaikan bersama. Wasisto (2015) menegaskan kepengaturan memang lahir dari komunitas adat lokal. Hak asal-usul tersebut bersinggungan dengan akses pertama kali masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam (Wade 1987 dikutip Wasisto 2015). Kasus-kasus yang berhasil dari sistem aturan yang dirancang secara lokal menunjukkan bahwa tidak perlu aturan dari luar. Pada konteks ini penghargaan terhadap otoritas lokal dan struktur sosial merupakan nilai terpenting untuk membentuk institusi yang melampaui komunitas, dusun, pluralisme yang diikat oleh otoritas desa bernama kolektivisme pluralistik (Geertz dikutip Sakro, 2020).

G. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1 Kerangka Pengelolaan Common Pool Resource Oleh Desa

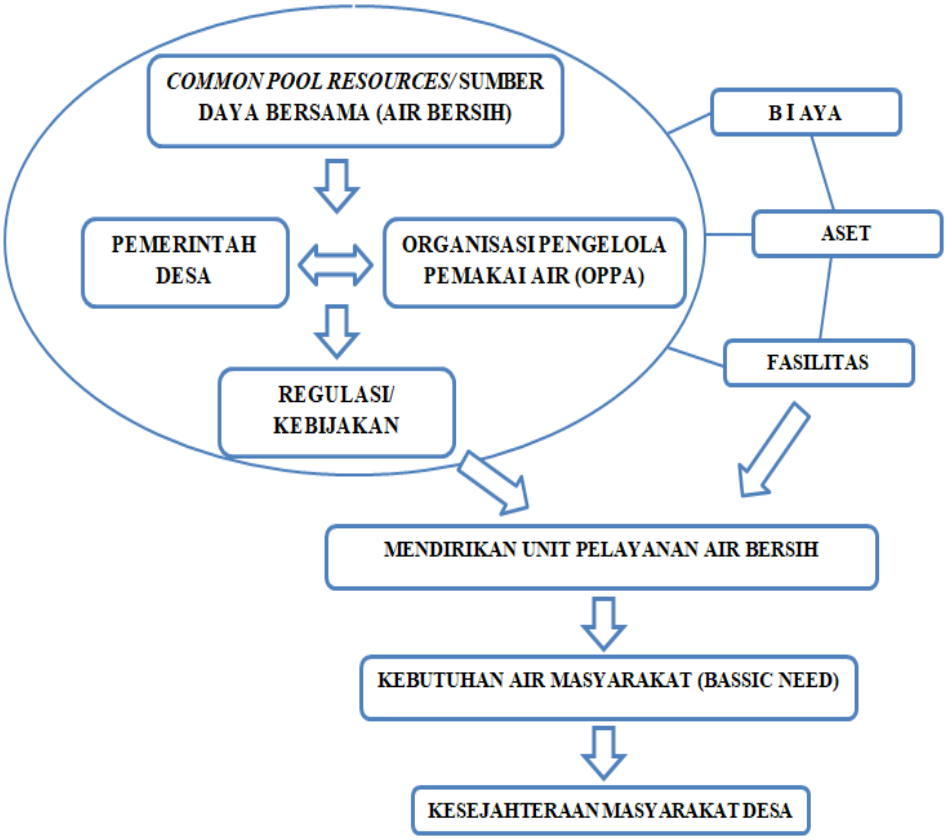

Secara konseptual, *Common Pool Resources* (CPR) merupakan sistem sumber daya alam maupun buatan manusia yang dimanfaatkan bersama oleh kelompok pengguna. *Common pool resources* adalah sumber daya yang bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi memberikan manfaat yang berkurang bagi setiap orang jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri. Sumberdaya air merupakan sumber daya alam yang tidak hidup (*abiotik*) namun dapat diperbaharui (*renewable resources*). Air adalah salah satu sumber alam paling penting bagi makhluk hidup namun sering menjadi permasalahan dalam keberadaannya (*occurance*), peredaran/sirkulasinya (*circulation*) dan penyebarannya (*distribution*). Dalam pengelolaan common pool

resources yang baik dan bekelanjutan dibutuhkan institusi. Kata institusi merupakan aturan yang manusia gunakan ketika berinteraksi di dalam situasi berulang dan terstruktur di berbagai tingkat analisis (Ostrom, 1990). Dalam kajian ini hendak menempatkan desa menjadi institusi terbaik untuk mengelola *common pool resource*. Pengelolaan *common pool resource* lebih baik dikelola dengan aksi kolektif desa. Dimana pemanfaatan atau pengelolaan *common pool resource tersebut* dapat dijadikan unit layanan air bersih oleh Desa. Dengan adanya layanan dalam bidang pengelolaan air bersih ini diharapkan mampu memenuhi segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun yang memerlukan air bersih. Air bersih merupakan salah satu satu kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Dalam kehidupan, manusia air digunakan dalam berbagai keperluan seperti: untuk keperluan MCK, memasak makanan, minum, dan keperluan lainnya.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menjelaskan bahwa Desa merupakan institusi terbaik untuk mengelola *common pool resource* serta menganalisis kelembagaan yang terjadi dalam relasi antara Pemerintah Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) dan Masyarakat Pemakai Air dalam pemanfaatan atau pengelolaan *common pool resource* yang dikelola oleh Desa, apakah masyarakat di desa tersebut dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera yaitu dimana kebutuhan masyarakat khususnya dalam kebutuhan air bersih dapat

terpenuhi. Oleh karena itu bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif.

Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, aktivitas sosial, dan lain-lain. Pengunaan pendekatan kualitatif membantu peneliti menemukan dan memahami apa yang terjadi dibelakang sebuah fenomena. Hal ini memerlukan pemahaman dan pemaknaan yang baik dari peneliti. Penelitian kualitatif cenderung kontekstual dan umumnya mempelajari suatu fenomena secara induktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang spesifik (khusus) kemudian menuju ke hal-hal umum untuk memahami makna (Tracy, 2013). Sementara itu metode dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Studi eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan informasi deskriptif, artinya pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” (Gray dalam Boru, 2018). Dengan begitu dapat pula teridentifikasi alasan suatu fenomena terjadi. Metode penelitian eksplanatif berusaha mencari penyebab dan alasan, serta memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal penjelasan atau prediksi. Hal ini dilakukan untuk menemukan beberapa hubungan antara berbagai aspek fenomena yang diteliti (Boru, 2018).

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta daerah perbukitan. Di tempat penelitian tersebut diharapkan penulis dapat menggali informasi terkait kelembagaan pengelolaan *common pool resource* atau sumber daya bersama dalam pemenuhan

kebutuhan air masyarakat. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian, yakni pada bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022.

c. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti (Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015: 75). Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Menurut Arikunto (2013:172) adalah: “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sedangkan menurut Indrianto dan Supomo (2013:142) sumber data adalah: “Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka”.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Menurut Umar (2013:42) data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Sedangkan menurut Indrianto dan Supomo (2013:142) data primer adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer, sumber utama yang dijadikan bahan penelitian adalah data primer yaitu data yang dihimpun melalui sumber wawancara di Kantor Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman dan sekitarnya.

2) Data Sekunder

Menurut Umar (2013:42) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram”. Sedangkan menurut Indrianto dan Supomo (2013:143) data sekunder adalah: Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari monografi desa serta berita media, artikel-artikel atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

Table 1 Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data			Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Catatan Lapangan	Teknik Penentuan Informan : *Snowball Sampling* (dari jumlah informan yang sedikit kemudian lama lama berkembang menjadi banyak). Hasil wawancara: 1. Ketua Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) 2. Pengelola Unit (Pengelola air bersih) 3. Carik Kalurahan Sambrejo 4. Masyarakat Pemakai Air	Wawancara Langsung
		Hasil pengamatan	Observasi
Data Sekunder	Dokumen Tertulis	Data profil Kapanewon Prambanan daerah perbukitan.	Teknik Dokumenter
		Data Sejarah Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA).	
		Data pengelolaan *common pool resource* atau sumber daya bersama (Air Bersih).	
		Berita media	
	Dokumen Visual	Foto	Visual

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Menurut Arikunto (2016:199) Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Sedangkan menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau prosesinteraksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

Teknik penentuan informan dalam wawancara yang penulis gunakan adalah teknik penentuan informan sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah dari jumlah informan yang sedikit kemudian lama lama berkembang menjadi banyak dikarenakan kebutuhan informasi yang lebih spesifik serta lebih banyak. Mungkin dalam proses penelitiannya, penulis memerlukan informasi yang lebih dalam penelitiannya. Misalnya seseorang yang dianggap sebagai informan kunci ternyata tidak memberikan informasi yang seperti penulis harapkan, untuk itu penulis perlu informan lain untuk mendapatkan informasi yang ditargetkan.

Proses penentuan informan dilapangan pertama saya datang kekantor Kalurahan Sambirejo dan bertemu dengan Carik Kalurahan Sambirejo yaitu Bapak Mujimin setelah bertemu dan melakukan wawancara saya diarahkan

untuk bertemu dengan Bapak Giyatno selaku Ketua Organisasi Pengelola Pemakai Air setelah melakukan wawancara saya juga diusulkan untuk mewawancarai Bapak Samidi selaku Bendahara Organisasi Pengelola Pemakai Air setelah mendapatkan informasi serta data-data terkait pengelolaan air bersih selanjutnya saya mewawancarai masyarakat pemakai air di beberapa desa di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman.

b) Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan observasi dapat memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam, sebab peneliti sudah melihat sendiri bagaimana keadaan obyek tersebut. Observasi merupakan upaya untuk pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2015).

c) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2014: 274) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, disamping peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maka juga menggunakan

dokumentasi sebagai bahan untuk melengkapi data-data yang dianggap masih kurang.

d. Metode Analisis Data

Menurut Cresswell (2015:274) analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian, analisis data bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169)

menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).

BAB II

LANSKAP KAWASAN PERBUKITAN KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Kondisi Geografis Kapanewon Prambanan

Luas wilayah Kapanewon Prambanan adalah 4.136,9200 Ha. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan dari permukaan air laut adalah 37,00 m dengan suhu maksimum 31,8 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius. Kapanewon Prambanan memiliki curah hujan 492,9 mm/tahun dengan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak selama 27 hari, suhu udara rata-rata harian adalah 28 derajat celcius. Secara topografi Kapanewon Prambanan memiliki wilayah dataran bergelombang 40 % dan bergeombang sampai berbukit 60 %. Jarak dari kalurahan ke pemerintahan sejauh 18 km. Jarak kapanewon ke pemerintahan kota/ kabupaten sejauh 25 km dan jarak kapanewon ke Ibukota Provinsi sejauh 25 km. Adapun batas wilayah Kapanewon Prambanan sebagai berikut :

1. Utara : Kapanewon Kalasan
2. Timur : Kapanewon Prambanan Kabupaten Klaten
3. Selatan : Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul
4. Barat : Kapanewon Berbah dan Kapanewon Kalasan

Gambar 2.1 Peta wilayah Kapanewon Prambanan

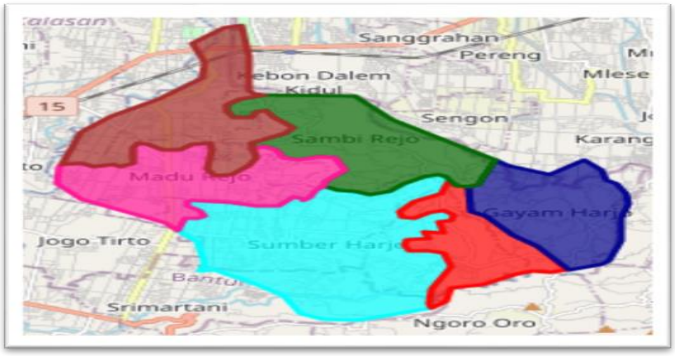

Kapanewon Prambanan terbagi menjadi 6 daerah administratif kalurahan yaitu Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Wukirharjo dan Kalurahan Madurejo. Namun dalam penelitian ini hanya 5 Kalurahan yang ada di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan yang di suplai air oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo untuk mengatasi masalah kekeringan atau memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan diantaranya yaitu Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Gayamharjo, dan Kalurahan Wukirharjo.

Luas wilayah Kapanewon Prambanan adalah 4.136,9200 Ha, dengan pembagian tata guna lahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Lahan

No	Lahan	Luas	
1.	Tanah Sawah	1.601,7380	Ha
	a. Irgasi Tehnis	581,6804	Ha
	b. Irgasi Setengah Tehnis	370,0000	Ha
	c. Irgasi Sederhana	1.044,4040	Ha
	d. Tadah Hujan/Rendengan	863,0000	Ha
2.	Tanah Kering	618,5010	Ha
	a. Pekarangan/Bangunan	948,7400	Ha
	b. Tegal/Kebun	449,0000	Ha
3.	Tanah Hutan	149,7530	Ha
	a. Hutan Produksi	149,5530	Ha
	b. Hutan Wisata	2,0000	Ha
4.	Tanah Perkebunan	546,7000	Ha
	a. Perkebunan Swasta	546,7000	Ha
5.	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	29,0000	Ha
	a. Lapangan Olahraga	32,0000	Ha
	b. Taman	13,0000	Ha
	c. Jalur Hijau	14,0000	Ha
	d. Kuburan	8,0000	Ha
6.	Lain-lain (tanah tandus, pasir)	122,0000	Ha
Jumlah		4.136,9200	Ha

Sumber: https://prambanankec.slemankab.go.id

Data tabel 2.1 tersebut menunjukkan bahwa Kapanewon Prambanan merupakan wilayah yang cukup luas yaitu 4.136,9200 Ha, dengan penggunaan lahan terbesar yaitu tanah sawah atau penggunaan lahan dalam bidang pertanian yaitu dengan luas 1.601,7380 Ha, namun karena sebagian besar wilayah Kapanewon Prambanan merupakan daerah perbukitan ketika musim kemarau sering terjadi kekeringan dan menyebabkan gagal panen hal itu dikarenakan kurang mendapatkan air untuk mengairi pertanian. Sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sleman mengusulkan kepada para petani, yang wilayahnya kesulitan mendapat air, supaya tidak menanam padi, namun sebaiknya menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang, kedelai dan lainnya untuk mengantisipasi gagal panen di musim kemarau. Selain tanah sawah atau penggunaan lahan pertanian, tata guna lahan di Kapanewon Prambanan antara lain tanah kering, tanah hutan, tanah perkebunan, tanah untuk keperluan fasilitas umum dan lain sebagainya dengan luas masing-masing tertera dalam tabel diatas.

B. Kondisi Demografis Kapanewon Prambanan Daerah Perbukitan

Dari 5 Kalurahan yang ada di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan yang di suplai air oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo untuk mengatasi masalah kekeringan atau memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat memilki jumlah penduduk sebanyak 40.473 jiwa. Data-data ini meliputi keadaan penduduk menurut jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan atau mata pencaharian.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia di dalam masyarakat. Jumlah penduduk

dapat di jadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan didalam suatu daerah.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kalurahan	Laki- Laki	Perempuan	L+P
1.	Sambirejo	2.899	2.971	5.870
2.	Bokoharjo	6.059	6.344	12.403
3.	Sumberharjo	7.342	7.439	14.781
4.	Gayamharjo	2.287	2.355	4.642
5.	Wukirharjo	1.384	1.393	2.777
Jumlah		19.971 jiwa	20.502 jiwa	40.473 jiwa

Sumber: Profil Kapanewon Prambanan Tahun 2021

Dari data tabel 2.2 di atas jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan hampir setara jumlahnya dan hanya selisih sedikit. Data di atas menjelaskan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19.971 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 20.502 jiwa dan jumlah penduduk keseluruhan Kapanewon Prambanan daerah perbukitan atau yang terdata di 5 Kalurahan yaitu 40.473 jiwa. Berdasarkan data jumlah penduduk dari 5 Kalurahan yang ada di Kapanewon Prambanan atas atau daerah perbukitan yang paling banyak penduduknya yaitu Kalurahan Sumberharjo dengan jumlah penduduk sebanyak 14.781 jiwa. Dan dari 5 Kalurahan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan Kalurahan yang mengalami dampak kekeringan terparah adalah Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Wukirharjo, Kalurahan Sumberharjo dan Kalurahan Gayamharjo sehingga mendapat suplai air bersih untuk

pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari dari Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) yang di kelola oleh Desa atau Kalurahan Sambirejo.

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Kalurahan					Total
		Sambirejo	Bokoharjo	Sumberharjo	Gayamharjo	Wukirharjo	
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.298	1.801	2.733	1.035	607	7.474
2.	Belum Tamat SD/MI	566	1.083	1.357	357	229	3.592
3.	Tamat SD/ MI	1.476	1.605	2.551	1.267	858	7.757
4.	SMP/MTs	1.069	1.670	2.176	789	503	6.207
5.	SMA/SMK/MA	1.378	4.572	5.077	1.055	531	12.613
6.	Diploma I/ II	6	100	41	9	2	158
7.	Akdm/ Dplm III/SM	17	384	210	30	12	653
8.	Diploma IV/ Strata I	56	1.095	603	97	32	1.883
9.	Strata II	4	85	30	3	3	125
10.	Strata III	0	8	3	0	0	11
Jumlah		5.870	12.403	14.781	4.642	2.777	-
		40.473 jiwa					

Sumber: Profil Kapanewon Prambanan Tahun 2021

Dari data table 2.3 di atas jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan mayoritas penduduknya masih mengikuti program pemerintah terkait pendidikan yaitu program wajib belajar 9 tahun sehingga tingkat pendidikan di wilayah tersebut tergolong tinggi karena sarana dan prasarana pendidikan mudah untuk diakses. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan masih menganggap pendidikan merupakan hal yang penting untuk generasi muda di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang tertera didalam tabel di atas meskipun penduduk yang tidak atau belum sekolah juga masih banyak, namun di 5 kalurahan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan masih sangat perduli dengan pendidikan dan menganggap bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Dan diharapkan dengan penduduk yang berpendidikan sesuai bidangnya di 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan dapat berkontribusi kepada pemerintah dengan memunculkan inovasi-inovasi yang dapat meringankan atau mengatasi kekeringan yang sering terjadi di wilayah tersebut.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Kalurahan					Total
		Sambirejo	Bokoharjo	Sumberharjo	Gayamharjo	Wukirharjo	
1.	Mengurus Rumah Tangga	631	1.809	1.971	155	118	4.684
2.	Pelajar/Mahasiswa	447	1.391	1.404	347	197	3.786
3.	Pensiunan	17	337	181	18	2	555
4.	Belum Bekerja	220	404	493	123	55	1.241
5.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	39	322	217	9	9	596
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2	33	60	1	0	96
7.	Kepolisian RI (POLRI)	3	43	41	1	0	88
8.	Pejabat Negara	1	0	1	0	0	2
9.	Buruh	1.585	1.646	2.410	1.880	254	7.775
10.	Sektor Pertanian /Peternakan /Perikanan	994	285	1.527	789	1.113	4.708
11.	Karyawan BUMN/BUMD	1	54	9	0	1	65
12.	Karyawan Swasta	457	2.144	2.271	285	296	5.453
13.	Wiraswasta	150	1.175	784	63	122	2.294
14.	Tenaga Medis	3	26	19	5	1	54
15.	Pekerjaan lainnya	17	39	39	18	13	126
Jumlah		4.567	9.708	11.427	3.694	2.181	-
		37.577 jiwa					

Sumber: Profil Kapanewon Prambanan Tahun 2021

Dari data table 2.4 di atas jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan memiliki pekerjaan yang beragam namun yang paling banyak adalah penduduk yang bekerja sebagai buruh, namun yang tidak atau belum bekerja yang terdata juga masih banyak. Tingkat pendapatan masyarakat merupakan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin baik pula kesejahteraan masyarakat.

Di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan juga merupakan wilayah persawahan dan perkebunan jadi dapat disimpulkan pula bahwa penduduk di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan juga bermata pencaharian sebagai petani namun karena wilayah Kapanewon Prambanan sebagian besar wilayah adalah daerah perbukitan yang sering terjadi kekeringan ketika musim kemarau sehingga banyak petani yang gagal panen karena pertaniannya kekurangan air. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan dari 5 Kalurahan yang terdata berjumlah 37.577 jiwa. Dari klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di 5 Kalurahan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan tingkat pendapatan penduduk masih tergolong rendah.

C. Kondisi Sosial Budaya Kapanewon Prambanan

Masalah keadaan sosial meliputi pelaksanaan hubungan dan kerukunan antara sesama, sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang harus selalu berjalan dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat di Kapanewon Prambanan dalam sehari-harinya selalu bersifat gotong royong dan tolong-menolong antara sesama. Di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman ini juga terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang masih ada sampai sekarang. Selain itu, masyarakat juga masih

mempertahankan adat dan budaya seperti masih menjalankan berbagai upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau live circle, misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi, seperti perkawinan, khitanan, tingkepan, mitoni, selapanan dan lain semacamnya selalu menggunakan cara saling tolong menolong dan memberikan sumbangan baik berupa materi maupun non materi yang juga dilakukan dengan tanpa pamrih.

Sementara itu tatanan masyarakat juga sudah mulai terjadi perkembangan dan perubahan, itu semua disebabkan oleh perubahan jaman dengan pengaruh budaya yang ada seperti, mulai dari cara berfikir, berpakaian, pergaulan, dan semacamnya. Salah satu pengaruh terjadinya perkembangan dan perubahan budaya di masyarakat tersebut disebabkan oleh banyaknya anak muda yang sudah terbawa arus modernisasi. Di samping itu Di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman juga terdapat beberapa peninggalan sejarah berupa candi diantaranya adalah Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Banyunibo, Candi Barong dan masih banyak lagi peninggalan sejarah lainnya di Kapanewon Prambanan.

Di Kapanewon Prambanan mayoritas penduduknya juga beragama Islam yang berarti kegiatan yang bersifat keagamaan dapat dipahami dan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga kebudayaan yang bersifat keagamaan masih kental di masyarakat misalnya perayaan Maulid Nabi, yaitu suatu budaya yang terwujud dengan satu tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya dalam perayaan ini diadakan pengajian selain itu ada pula Upacara Bersih Dusun atau Rasulan yang menandakan kesyukuran Kepada Yang Maha Esa bahwa setelah Menanam semua tanaman pada musim hujan dan telah membuahkan hasil atau panen. Selain itu jika ada

berita duka masyarakatnya masih menjalankan tahlilan kenduri tiga hari, tujuh hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.

Masyarakat desa dikenal erat dan dekat hubungan dengan sesamanya. Masyarakat desa punya hubungan kekerabatan yang erat. Di Kapanewon Prambanan banyak warga desa yang hanya bekerja sebagai buruh atau petani, namun ada juga warga desa yang bekerja di sektor informal seperti tukang kayu, buruh bangunan, dan sebagainya. Bertani dan pekerjaan lainnya masih dilakukan dengan tradisional hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meningkatkan taraf hidup dan mensejahterahkan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah. Upaya mensejahterahkan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya masyarakat yang mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu keterlibatan pihak-pihak lain salah satunya ialah lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari demokrasi Desa.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, lembaga semacam ini biasa disebut dengan LKMD dan menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Adapun beberapa Lembaga kemasyarakatan Desa di desa-desa di Kapanewon Prambanan LPMD/LPMK atau sebutan lain, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Masyarakat desa di Kapanewon Prambanan juga masih menyimpan banyak hal subtantif yang perlu dijaga dan dikembangkan misalnya tali persaudaraan. Masyarakat sangat sadar dan peduli terhadap jalinan persaudaraan. Contohnya ketika hari raya umat muslim bagi yang merayakan pertama mereka akan mengunjungi saudara tertua, bergiliran pindah ke rumah keluarga lebih muda. Pada waktu demikian, biasanya tampak keunikan yang disadari atau tidak-bahwa nyaris semua penduduk desa tersebut adalah saudara sendiri. Selain masyarakat juga masih menjalankan gotong royong, hampir seluruh pekerjaan dikerjakan secara kolektif, seperti menanam atau memanen, bahkan mendirikan rumah. Dalam praktiknya, seseorang yang memiliki hajat seperti hendak mendirikan rumah, biasanya mendatangi rumah warga sekitar untuk minta tolong. Tindakan orang tersebut lebih kepada penghormatan terhadap tetangga. Sebab andai tidak dimintai tolong, masyarakat sekitar dipastikan tetap hadir membantu. Tanpa komando, masyarakat akan berbondong-bondong membantu. Selain hal itu, toleransi menjadi ciri khas masyarakat, keakraban, tegur-sapa, komunikasi yang hangat, dan saling menghormati sudah menjadi sikap keseharian masyarakat desa. Karakter ini tertanam kuat sehingga peluang munculnya konflik di masyarakat sangat jarang terjadi.

D. Pemerintahan

Pada penelitian ini Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo yang awal mulanya berada dibawah wewenang Kapanewon Prambanan saat ini agar pengelolaan air bersih lebih efisien dan merata untuk masyarakat Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) diserahkan ke Desa Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sambirejo telah di atur

dalam Peraturan Desa Sambirejo, yaitu Nomor 3 Tahun 2017 yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Desa.
2. Perangkat Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo

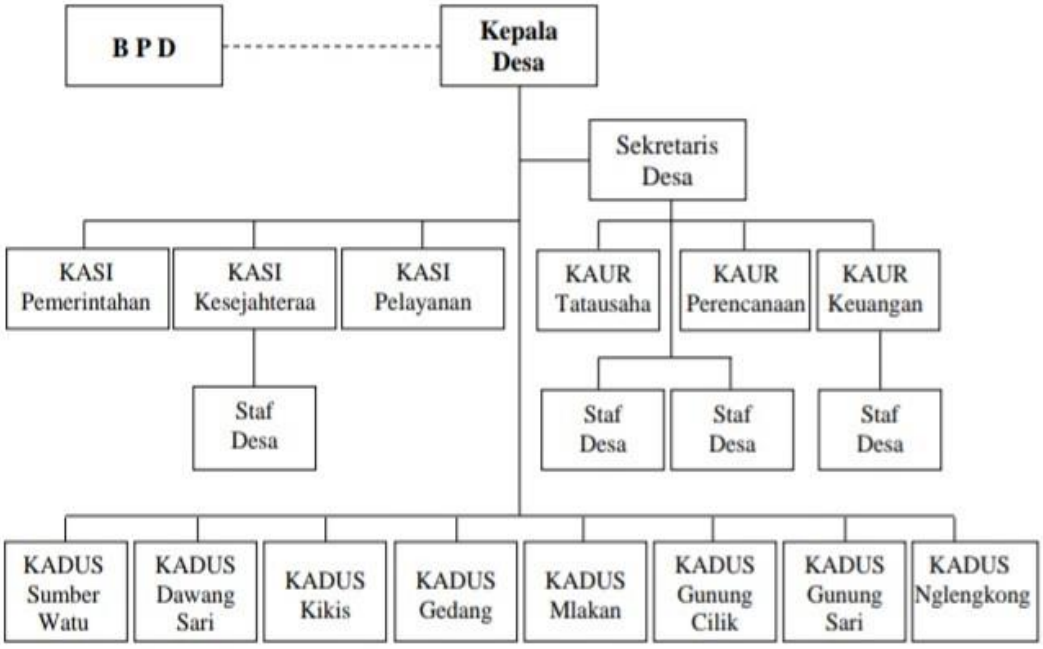

Sumber data: Sekretariat Desa Sambirejo

Pada bagan di atas dapat lihat Bagan Struktur Organisasi yang menggambarkan hierarki dan alur kerja pemerintah desa di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Bagan Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo belum sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 karena masih memasukkan BPD pada bagan struktur organisasi. Bagan diatas menggambarkan bahwa dalam Pemerintahan Desa Sambirejo adalah bagian pelaksana kepemerintahan dengan orinetasi

pada pelayanan kepada masyarakat, disisi yang lain juga adanya kontrol terhadap proses kerja pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digambarkan dengan garis koordinasi putus-putus yang artinya BPD adalah mitra Pemerintah Desa. BPD dalam hal ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis yang menjadi wakil dari kelompok masyarakat yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan proses roda pemerintahan di Desa Sambirejo.

Kepala Desa tidak berdiri secara sendiri tetapi juga di dukung oleh perangkat-perangkat di bawahnya yang menjadi instrumen dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja desa menuju kemajuan dan kemandirian. Desa Sambirejo menerapkan pelayanan dengan slogan Pelayanan Administrasi Terpadu Desa (PANTES) dengan harapan menuju pelayanan publik yang berkualitas. Sebagaimana dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa keberhasilan suatu desa sangat dipengaruhi oleh Pemerintah Desa bersama warga masyarakat yang tergabung dalam himpunan yang digambarkan pada Badan Permusyaratan Desa (BPD).

E. Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo

Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kapanewon Prambanan setiap tahunnya beberapa kalurahan di Kapanewon Prambanan mengalami kekeringan yang sangat parah. Kalurahan yang mengalami dampak kekeringan terparah adalah Sambirejo, Wukirharjo, Sumberharjo dan Gayamharjo. Beberapa Kalurahan di Kapanewon Prambanan tersebut letak geografisnya dengan kondisi alam yang berupa bukit atau tegalan dan sering terjadi kekeringan panjang yang menyebabkan sulitnya di jangkau oleh kendaraan yang berat karena medan terjal. Sehingga kebutuhan air bersih disana sulit untuk diatasi. Namun

pemerintah terus berupaya mencari solusi dalam permasalahan bencana alam kekeringan ini.

Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo dibentuk sejak tahun 2002 setelah pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Sleman membangun jaringan air bersih di Prambanan dengan sumur induk di Majasem Bokoharjo. Dengan nama Sistem Prambanan I karena Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo masih berada di bawah kepengurusan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Kapanewon Prambanan.

1. **Tahap Pembangunan**

   Tahun 2001 dimulai proses pembangunan saluran air bersih Sistem Prambanan I dengan pengurus Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo, berupa 1 (satu) Sumur Induk 2 (dua) Booster dan 3 (tiga) reservoar (Bak Penampungan Air). Bekerja dengan 3 (tiga) buah mesin diesel sebagai penggerak motor untuk menghidupkan pompa. Namun untuk menghemat biaya pengeluaran, sekarang telah berganti dengan tenaga listrik untuk menggerakan pompa dalam distribusi air.

2. **Kedudukan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA)**

   Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo berada di bawah Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Kapanewon Prambanan untuk mengelola Sistem Pambanan I Sumur Majasem. Namun agar pengelolaan air bersih lebih efisien dan merata untuk masyarakat Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) diserahkan ke Desa Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman dan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Desa diluar BUMDesa dengan SK Kepala Desa

sehingga saat ini yang berwenang mengatur dan mengurus Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo adalah Desa tepatnya Desa Sambirejo.

3. Struktur Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo

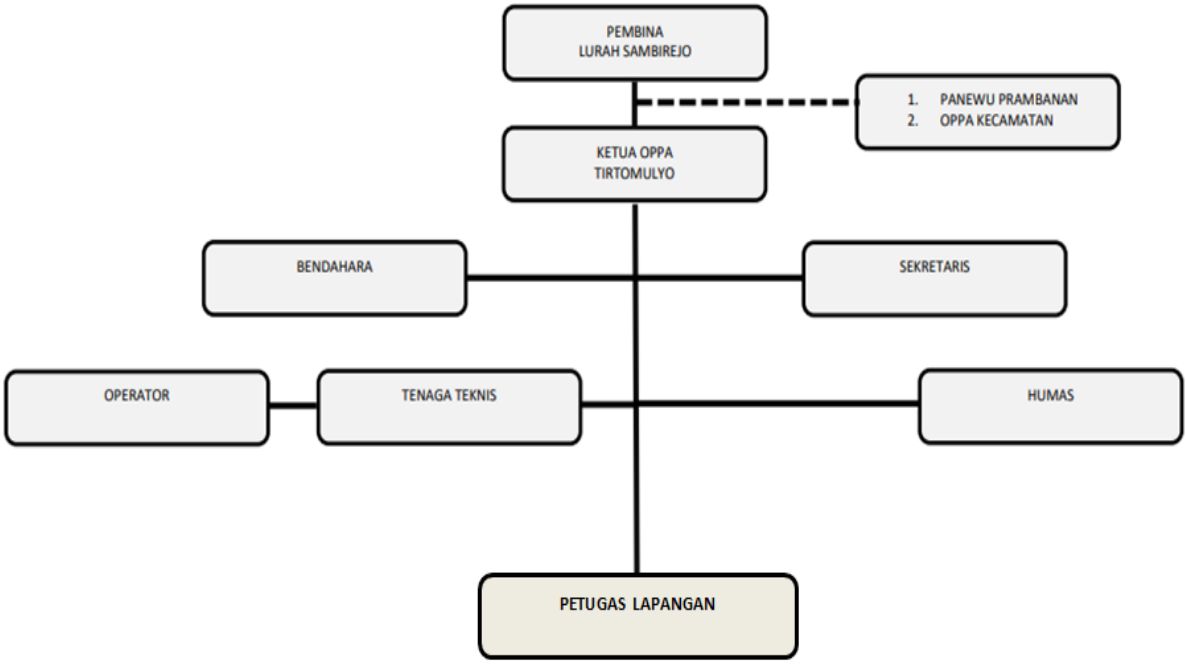

Sumber : Sekretariat Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

4. Kegiatan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo

a. Rapat Rutin

Rapat rutin Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo dilaksanakan setiap tanggal 5 pada awal bulan yang bertempat di Aula Kalurahan Sambirejo. Dalam pertemuan tersebut juga untuk menyetor uang dari konsumen dari petugas lapangan kepada bendahara Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo.

b. Bantuan Sosial Masyarakat

Namun saat ini bantuan sosial masyarakat sejak tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi virus corona.

c. Bantuan Covid 19

Karena adanya pandemi Covid-19 maka Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo membuat program bantuan keringanan biaya kepada masyarakat pemakai air Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo sebagai bentuk kepedulian Organisasi terhadap keadaan yang sulit pada masyarakat. Bantuan ini berupa keringanan 5 m^3 kepada setiap konsumen setiap bulan selama 2 (dua) bulan.

d. Perbaikan-Perbaikan

1) Penggantian pompa, chasing dan instalasi sumur induk Majasem yang rusak.
2) Penggantian pompa komplit di boster 2 yang perlu diganti atau rusak.
3) Penggantian Kipas di Boster 1 yang perlu diganti atau rusak.
4) Perbaikan-perbaikan rutin lainnya.

5. Peta Jaringan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo

Gambar 2.4 Peta Jaringan Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo

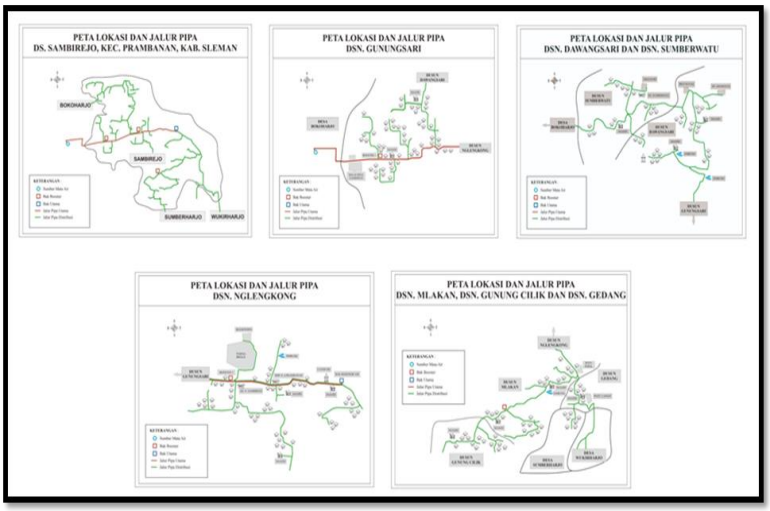

Sumber : Sekretariat Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini secara umum akan menyajikan kesimpulan serta saran terkait kajian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian kesimpulan, akan menyajikan gambaran pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di daerah atau kawasan perbukitan yang setiap tahunnya mengalami masalah kekeringan yang parah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kapanewon Prambanan membentuk Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) dan seiring berjalannya waktu Organisasi tersebut diserahkan ke Desa Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman dan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat. untuk mengelola air guna mengatasi masalah kekeringan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan. Kemudian pada bagian saran akan disajikan berdasarkan hasil temuan yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya.

B. Kesimpulan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dan diakui kewenangannya untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri termasuk mengelola sumber daya bersama atau *common pool resource* yang ada di desa. Di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan sumber daya bersama atau *common pool resource* dikelola oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) dimana organisasi tersebut merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kapanewon Prambanan yang di serahkan ke

Desa Sambirejo dan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengelola air guna mengatasi masalah kekeringan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan. Pengelolaan sumber daya air oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) ini perkembangannya dari tahun ke tahun sangat baik dan sudah dapat mendistribusikan air bersih ke 13 Dusun di 5 Kalurahan yang berada di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan yang setiap musim kemarau mengalami kekeringan yang parah.

Didalam pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* ini terjalin relasi yang sangat baik antara Pemerintah Desa, Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA), dan Masyarakat Pemakai Air. Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahanya sendiri sehingga pemerintah desa tahu apa yang dibutuhkan oleh warganya untuk memenuhi kebutuhan air bersih warganya pemerintah desa melakukan pembinaan pengelolaan air bersih kepada Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA), begitu juga dengan relasi Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) dengan masyarakat dimana Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) selalu cepat tanggap mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pendistribusian air bersih, masyarakat juga sadar akan kewajibanya berpartisipasi dalam jalannya pengelolaan sumberdaya bersama atau common pool resource yang dikelola oleh Desa ini.

Sebelum Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) ini diserahkan ke Desa Sambirejo untuk mengelola sumber daya air di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan ketika musim kemarau masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam mengatasi masalah kekeringan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan

antara lain adanya subsidi air bersih oleh pemerintah, droping air menggunakan tangki oleh swasta, adanya program Pamsimas, dan yang terakhir yaitu pengelolaan air bersih oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air. Namun dalam berjalannya waktu beberapa upaya tersebut bukan merupakan solusi untuk mengatasi masalah kekeringan di Kapanewon Prambanan daerah perbukitan karena pendistribusian air bersih tidak merata sehingga menimbulkan banyak konfik dalam pendistribusiannya. Dan setelah Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) diserahkan ke Desa Sambirejo dan mengelola sumber daya air dari nol dengan kepengurusan baru dimulai dengan pengelolaan gotong-royong dari tahun 2013 sampai sekarang pendistribusian air bersih lebih merata dimasyarakat dan juga kebutuhan pokok air bersih di masyarakat 90% terpenuhi. Dari pernyataan-pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan institusi yang tepat untuk mengelola sumber daya bersama atau *common pool resource* karena Desa merupakan susunan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk itu dalam pendistribusiannya juga lebih merata di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan air bersih oleh Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo ini beban pemerintah dalam mengatasi masalah kekeringan dan pemenuhan kebutuhan pokok air bersih masyarakat dapat teratasi.

C. Saran

Beberapa saran dan rekomendasi terkait dengan pengelolaan sumber daya bersama atau *common pool resource* di Kapanewon Prambanan khususnya di kawasan perbukitan yang sering mengalami kekeringan yang parah di setiap tahun ketika musim kemarau, berpijak pada realita yang terjadi Pertama, pengelolaan *common pool resource* atau

sumberdaya bersama ini harus dibentuk Forkom desa antara Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo dengan Kalurahan-Kalurahan di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, hal ini harus dilakukan karena *common pool resource* atau sumberdaya bersama yang dikelola ini berada di desa lain bukan di Desa Sambirejo selaku pengelola *common pool resource* tersebut. Kedua, pengelolaan *common pool resource* tersebut sebisa mungkin harus merata pendistribusiannya dan selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, pengelolaan ini sudah tepat dikelola oleh desa tidak perlu diganti-ganti institusi pengelola sumber daya bersama karena sesuai dengan dua asas yang diletakkan pada UU Desa yaitu Desa berhak untuk mengelola, membuat aturan, mengurus dan mendistribusikan keadilan kepada masyarakat melalui pengelolaan *common pool resource* atau sumber daya bersama.

DAFTAR PUSTKA

A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group.

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiyarto, Arie. 2017. *Evaluasi Kondisi Komunitas Konservasi Mangrove: Studi Kasus Lembaga Pelestari Mangrove Dan Pesisir Wana Tirtakulon Progo DIY*. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017.

Carroll, T. 2012. *Kebijakan Pembangunan Neo-Liberal di Asia Pasca-Konsensus Wasington*, Jakarta: INFID.

Creswell, John W. 2015. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fleischman, et al. 2014. *Evaluating The Utility Of Common Pool Resource Theory For Understanding Forest Governance And Outcomes In Indonesia Between 1965 And 2012. International Journal Of The Commons*. Vol.8, No.2, pp 302-336. 33 page.

Eko S. M. Barori dan Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta. Pascasarjana STPMD "APMD".

http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/mari-memahami-regulasi-penataan-kewenangan-desa

https://jogja.tribunnews.com/2018/09/11/musim-kemarau-ratusan-kk-di-kecamatan-prambanan-butuh-bantuan-air-bersih?page=2

https://prambanankec.slemankab.go.id

Kodoatie Robert J, Syarief Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kustanti, Asihing dkk. 2014. *Evolusi Hak Kepemilikan Dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Lampung Mangrove Center*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. Vol. 1 No. 3, Desember 2014: 143-158

Maryati, Sri. 2018. *Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Hippam Mandiri Arjowinangun, Kota Malang).* Jurnal Wilayah Dan Lingkungan. Volume 6 Nomor 2, Agustus 2018, 131-147

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Mulyono, Galih Puji. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Tata Penglolaan Air di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum. Doi: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3292.

Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho H, Dwipayana A. dkk. 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

Numan. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet. ke-3,hlm. 226.

Nursidah dkk. 2012. *Pengembangan Institusi Untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP Das Arau, Sumatra Barat*. JMHT Vol.XVIII: 18 -30, April 2012.

Ostrom. 1990. *Governing The Commons; The Evolution of Institutions for Collective Action.* New York. Cambrige University Press.

Patriana, Ratna dkk. 2016. *Perubahan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional (Kasus Kelembagaan Sasi Di Kaimana).*

Putri, Amelia Ari dan Sihaloho, Martua. 2018. *Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Community Access In Water Resources Utilization.* Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 2 (5): 681-692. DOI: https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.681-692

Profil Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Profil Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Profil Organisasi Pengelola Pemakai Air (OPPA) Tirtomulyo.

Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika. Halaman 178.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.hal 99.

Sakro, Agustinus. 2020. *Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa : Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul.* Governabilitas Volume 1 Nomor 2 Desember 2020

S. Agung S dkk. 2019. *Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources (Germadan Rawa Pening: Collective*

Action In Managing Common Pool Resources). doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.1-12

Saunders P. F. 2014. *The promise of common pool resource theory and the reality of commons projects.* International Journal of the Commons Vol. 8, no 2 August: 636–656.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. cet. ke-1. hlm. 97.

Berita Media :

https://bpbd.go.id/sosialisasi-dan-edukasi-penanggulangan-bencana-berbasis-masyarakat/

https://www.solopos.com/kekeringan-sleman-warga-prambanan-mulai-mendapatkan-bantuan-air-bersih-dari-pemerintah-631080/amp

https://jogja.antaranews.com/amp/berita/303769/cadangan-air-bersih-warga-prambanan-hampir-habis

https://nasional.tempo.co/amp/509228/sebagian-wilayah-di-prambanan-mulai-kekeringan

https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/butuh-perhatian-empat-desa-di-prambanan-rawan-kekeringan/

https://infopublik.id/kategori/nusantara/374727/atasi-kekeringan-bpbd-sleman-salurkan-air-ke-prambanan?

https://www.solopos.com/musim-kemarau-warga-prambanan-mulai-beli-air-bersih447041/amp

https://www.ampl.or.id/program/program-nasional-penyediaan-air-minum-dan-sanitasiberbasis-masyarakat-pamsimas-/